BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Perubahan paradigma manajemen pemerintahan khususnya pemerintah daerah merupakan suatu tuntutan yang perlu direspon oleh pemerintah daerah karena perubahan tersebut turut mendorong perubahan manajemen keuangan daerah. Tuntutan tersebut memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip keuangan daerah, baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban.Salah satu perubahan mendasar dalam keuangan daerah pasca reformasi keuangan daerah adalah perubahan sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Inti dari perubahan tersebut adalah tuntutan dilaksanakannya akuntansi pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah, baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.

Implementasi sejumlah perangkat perundang-undangan dibidang pemerintahan daerah belum bisa dijadikan acuan utama dalam mewujudkan *good public governance*, khususnya dibidang pengelolaan keuangan daerah, tetapi masih membutuhkan pengkajian yang lebih mendalam, khususnya menyangkut pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah serta manajemen dan pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini, unit satuan kerja dipandang memiliki peranan

utama dalam operasional roda pemerintahan di daerah, karena unit satuan kerja merupakan pusat-pusat pertanggungjawaban pemerintah daerah dan relatif lebih banyak mengkonsumsi sumber daya, yang tentunya harus diperuntukkan dan di Pertanggungjawabkan pada kepentingan publik.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan salah satu perencanaan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan penyelenggaran pemerintahan. Disisi lain, dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan perencanaan dimaksud, pemerintah daerah perlu membuat suatu laporan hasil pelaksanaan APBD untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program-program pemerintah daerah. Laporan pertanggungjawaban menjadi salah satu kewajiban pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan .

Pengelolaan keuangan daerah harus transparansi yang mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Selain itu, akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik juga diperlukan, dalam arti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Kemudian, *value for money* yang berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Dengan adanya penerapan prinsip-prinsip tersebut, maka akan menghasilkan pengelolaan keuangan daerah (yang tertuang dalam APBD) yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Sehingga nantinya akan melahirkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan selama ini dengan menggunakan pendekatan superiritas negara telah membuat aparatur pemerintah yang bergerak dalam kegiatan pengelolaan keuangan daerah tidak lagi dianggap berada dalam kelompok profesi manajemen oleh para profesional. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelurusan kembali pengelolaan keuangan pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintah yang baik yang sesuai dengan lingkungan pemerintah (PP No 60 Tahun 2008).

Akuntansi akan mempunyai peran yang nyata dalam kehidupan sosial ekonomi kalau informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dapat mengendalikan perilaku pengambil kebijakan ekonomik untuk bertindak menuju ke suatu pencapaian tujuan sosial dan ekonomik negara. Salah satu tujuan ekonomi negara adalah alokasi sumber daya ekonomik secara efisien sehingga sumber daya ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dapat dinikmati masyarakat secara optimal.

Bila dicermati lebih jauh dalam pengelolaan keuangan daerah akuntansi menjadi salah satu kendala teknis bagi eksekutif dalam

pengelolaan keuangan daerah. Pandangan ini sejalan dengan pandangan yang menegaskan bahwa dari sekian banyak problem yang ada pada pemerintah daerah salah satunya adalah tentang akuntansi. Pernyataan ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan daerah pada masing-masing unit satuan kerja perlu dicermati guna menyelesaikan program akuntansi dan penyajian informasi yang memadai, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang baik pula ini berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD memiliki posisi strategis dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang akuntabel.

Agar akuntansi dapat dijadikan salah satu alat dalam mengendalikan roda pemerintahan, akuntansi harus dipahami secara memadai oleh penyedia informasi keuangan. Sebagai alat kontrol dan alat untuk mencapai tujuan pemerintah, sistem akuntansi keuangan harus dapat berperan dalam mengendalikan roda pemerintahan dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah berdasarkan aturan yang berlaku.

Akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Yang disebut keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tesebut.

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu pemikiran yang cerdas melalui inovasi sistem akuntansi.

Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem akuntansi yang baik, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang *accountable,* dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun manfaat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan.

Perbedaan penerapan sistem akuntansi pada masa pra reformasi dan sistem yang baru adalah sistem akuntansi penatausahaan keuangan daerah yang berlaku pada masa lalu dan saat ini tercemin dalam perhitungan APBD

menggunakan sistem pembukuan tunggal yang berbasis kas. Prinsip basis kas adalah mengakui pendapatan pada saat diterimanya kas dan mengakui belanja atau biaya pada saat dikeluarkannya kas. Hal tersebut tentu saja sangat terbatas, karena informasi yang dihasilkan hanya berupa kas yang terdiri dari informasi kas masuk, kas keluar, dan saldo kas. Sebagaimana diuraikan diatas maka diperlukan pengembangan atas sistem akuntansi yang baru, yaitu:

1. Pengembangan sistem pembukuan berganda (*Double entry*), dimana setiap transaksi dicatat dengan jurnal berpasangan, yaitu sisi debit dan sisi kredit.
2. Penggunaan basis akrual (*accrual basis*) dengan mengembangkan prinsip dan asumsi bahwa pencatatan transaksi keuangan tidak hanya dilakukan pada saat terjadi penerimaan dan pengeluaran uang. Dengan basis akrual, informasi yang akan diberikan kepada pemakai tidak hanya terbatas pada transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas, melainkan juga kewajiban yang membutuhkan penyelesaian kas dimasa depan dan informasi lain yang mempresentasikan kas yang akan diterima dimasa depan. (www.bpkp.go.id).

Menurut Farid Sjarkowi dewasa ini sistem akuntansi keuangan daerah mendapat perhatian besar dari berbagai pihak. Terutama dalam proses pencatatannya yaitu kurang baiknya laporan keuangan atau anggaran pemerintah daerah (LKPD) dilihat dari hasil pemeriksaan, bisa menjadi indikasi kurang kredibelnya pengelolaan keuangan daerah. Untuk tahun 2007 saja, dari 24 Laporan keuangan Pemerintah daerah kabupaten/kota yang diperiksa, tujuh diantaranya mendapat opini *disclaimer*. Selebihnya 16 kabupaten/kota yang lain

mendapat opini wajar dengan pengecualian, dalam hal ini dapat dilihat sebagai tindakan penyusunan LKPD yang belum melalui prosedur akuntansi serta tidak memiliki kebijakan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan, dan kurangnya keterbukaan akuntabilitas atau pertanggungjawaban (www.pikiran-rakyat.com).

Pelaksanaan good governance menuntut pemerintah melakukan perbaikan sistem birokrasinya agar terbentuk pemerintahan yang lebih transparan dan *accountable* sehingga pemerintahan menjadi lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Pengukuran kinerja pemerintah daerah diperlukan agar pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terbentuk. Selama ini pengukuran kinerja pemerintah daerah tidak cukup representatif menunjukkan ketransparanan dan keakuntabilitasan kinerja karena hanya mengukur kemampuan pemerintah dalam menyerap sumber daya input terutama anggaran sebanyak-banyaknya sehingga paradigma sistem pengukuran kinerja ini perlu diubah. Perubahan sistem pengukuran kinerja tersebut ditandai dengan adanya kewajiban setiap pemerintah daerah untuk membuat keuangan kinerja pemerintah daerah untuk mengetahui kemampuan setiap kinerja pemerintah dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian ataupun tujuan kinerja pemerintah daerah penjabaran visi, misi dan strategi kinerja pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan atau pencapaian pelaksanaan Kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan menurut Pamungkas (2000) menjelaskan bahwa

kinerja adalah penampilan cara-cara untuk menghasilkan suatu hasil yang diperoleh dengan aktivitas yang di capai dengan suatu unjuk kerja. Dengan demikian kinerja adalah konsep utama organisasi yang menunjukan beberapa jauh tingkat kemampuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dilakukan dalam pencapaian tujuan. Di samping itu, selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara objektif. Kesulitan ini disebabkan belum pernah disusunnya suatu sistim pengukuran kinerja yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan suatu organisasi (Sumber: LAN,2000:1).

Berdasarkan uraian di atas Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **"Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah"**.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Untuk menyelesaikan masalah yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya, perlu adanya pengidentifikasian masalah sehingga hasil analisa selanjutnya dapat terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kurangnya sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas melalui inovasi sistem akuntansi.
2. Kurang optimalnya penerapan dalam sistem akuntansi keuangan daerah terutama dalam proses pencatatannya yaitu seharusnya pada saat ini menggunakan sistem pencatatan yang berpasangan (*Double entry)* dan prinsip Basis Akrual (*accrual Basis*) tetapi Pemerintah Kota bandung belum sepenuhnya menggunakan, kadang-kadang masih menggunakan sistem pembukuan tunggal berbasis kas (*Single entry).*
3. Masih terdapat kinerja pemerintah daerah Kota Bandung yang kinerjanya belum maksimal dimana informasi kinerja belum bisa di andalkan dan kinerja outcomenya belum selaras dengan outcome yang ingin di capai pada pemerintahan kota bandung.

1.2.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang diuraikan diatas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan daerah terhadap sistem akuntansi keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Bandung.

2. Bagaimana sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan danAset Daerah di Pemerintah Kota Bandung.
3. Bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Bandung.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis informasi beserta data yang relevan pengelolaan keuangan daerah,sistem akuntansi keuangan daerah, kinerja pemerintah daerah serta untuk memperoleh gambaran perbandingan antara teori dengan pelaksanaannya di lapangan.

1.3.2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan daerah terhadap sistem akuntansi keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan danAset Daerah di Pemerintah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan danAset Daerah di Pemerintah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Sebagai tambahan informasi pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah, dan kinerja pemerintah daerah di Kota Bandung
2. Dalam hal pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengayaan atas teori-teori yang telah ada.
3. Bagi dunia pendidikan, diharapkan dapat menjadi acuan dan sumbangan pemikiran pengembangan pendidikan akuntansi dimasa yang akan datang.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Penelitian atas pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah, dan kinerja pemerintah daerah dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan, dan disamping itu, penelitian tersebut dapat memberikan manfaat bagi :

1) Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah, dan kinerja pemerintah daerah.

2) Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian lain yang ingin mengkaji di bidang yang sama**.**

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Bandung yang berlokasi di Jl. Wastukencana No. 2 Bandung

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Maret 2012 sampai dengan Agustus 2012.

Tabel 1.1

PelaksanaanPenelitian

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Maret 2012	April 2012	Mei 2012	Juni 2012	Juli 2012	Agustus 2012
I	**TahapPersiapan:**						
	a. Membuat outline dan Proposal UP	■					
	b. Mangambilformulir penyusunan skripsi	■					
	c. Menetapkan tempat penelitian	■					
II	**TahapPelaksanaan:**						
	a. Bimbingan UP	■					
	b. Acc UP	■					
	c. PendaftaranSidang UP		■				
	d. Sidang UP		■				
	e. Revisi UP		■				
	f. AccRevisi UP		■	■			
	g. Peneliti Perusahaan		■	■	■		
	h. Bimbingan di perusahaan		■	■	■		
	i. Membuat outline dan proposal skripsi				■		
	j. Penyusunan skripsi				■	■	
	k. Bimbingan skripsi				■	■	
	l. Acc skripsi						
III	**TahapPelaporan:**						
	a. Menyiapkan draft skripsi					■	
	b. Sidang akhir skripsi					■	
	c. Revisi skripsi					■	
	d. Acc revisi skripsi					■	
	e. Penyempurnaan laporan skripsi					■	
IV	**TahapAkhir:**						
	a. Wisuda						■
	b. Penyerahan laporan						■